



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB, tahun 2010



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Aktivitas pembangunan tidak terlepas dari pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada sumberdaya alam, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Makin tinggi laju pembangunan, makin tinggi pula tingkat pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan-perubahan pada lingkungan hidup semakin besar (Haryani, 2002).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah mendorong dan mengharuskan pemda setempat untuk memanfaatkan sumberdaya laut guna memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan daerah masing-masing. Usaha tambak udang merupakan salah satu budidaya perikanan yang mulai diminati beberapa pemda di Jawa Tengah (Supriharyono, 2000).

Kegiatan sektor perikanan di Indonesia didukung oleh 2,5 juta kepala keluarga petani ikan. Jumlah masyarakat yang bergerak di sektor perikanan dengan areal yang luas menyebar tidak seimbang. Kondisi demikian menyebabkan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan masih sangat rendah, karena baru mencapai 29,14 persen dari potensi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

lestarinya. Sebagian besar penangkapan ikan di laut masih berkisar di perairan pantai dan terpusat di daerah pantai yang padat penduduknya, seperti pantai di sekitar utara Pulau Jawa, Selat Bali, dan Selat Malaka. Akibatnya pantai-pantai di daerah tersebut telah digarap melebihi potensi lestarinya. Hal ini menyebabkan tangkapan nelayan cenderung menurun kualitas maupun kuantitasnya. Kenyataan itu jelas menghambat komoditas tangkapan untuk berkembangbiak dengan baik. Selain itu penangkapan ikan yang terus menerus, lambat atau cepat akan menyebabkan daerah pantai menjadi jenuh tangkap (Buwono, 1992).

Sekitar 75 persen produksi ikan Indonesia berasal dari penangkapan, sedangkan sisanya berasal dari kegiatan budidaya jenis ikan yang utama. Lebih dari 90 persen penangkapan ikan di perairan darat, seperti sungai dan danau berada di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, sedangkan ikan yang dibudidayakan di tambak air payau dan air tawar banyak dilakukan di Pulau Jawa (Afrianto, 1991).

Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tanggal 1 Juli 1980 tentang pelarangan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau, andalan produksi udang 60–70 persen berasal dari penangkapan udang laut dengan alat pukat harimau (*trawl*), sedangkan 25-30 persen berasal dari budidaya udang tambak. Keputusan tersebut melarang kapal-kapal motor penangkap udang yang menggunakan pukat harimau karena dapat merusak kelestarian sumber daya perairan.

Dampak selanjutnya berarti peluang emas bagi petani tambak untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

meningkatkan ketrampilan dalam usaha meningkatkan produksi udang (Soetomo, 2000).

Udang dipilih sebagai andalan utama penyumbang devisa karena Indonesia memiliki luas lahan yang potensial untuk budidaya udang mencapai 866.550 hektar, sementara sampai tahun 1999 luas tambak yang dibangun baru mencapai 344.759 hektar. Hal tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatannya baru 39,7 persen, sedangkan potensi penangkapan udang di laut diperkirakan 74.000 ton per tahun dan telah dimanfaatkan sekitar 70.000 ton per tahun. Angka tersebut menunjukkan tingkat penangkapan udang di laut sudah mencapai 95 persen, sehingga yang masih dapat ditingkatkan adalah hasil budidaya udang di tambak (Amri, 2003).

Maskur (2002), mengemukakan sejak beberapa tahun terakhir kegiatan budidaya tambak mulai diarahkan ke kawasan pantai selatan Jawa. Kawasan pantai selatan Jawa memiliki faktor kualitas pantai yang relatif masih bagus, sehingga sangat mendukung usaha pengembangan budidaya udang dalam jangka panjang. Selain itu kecilnya beban pencemaran dari darat serta infrastruktur yang memadai adalah nilai tambah yang patut diperhitungkan.

Uji coba proyek tambak udang windu di Yogyakarta menunjukkan bahwa kawasan daerah pantai selatan Jawa yang selama ini dikenal sebagai tanah gersang dan dianggap tidak ekonomis diolah sebagai lahan pertanian, sebetulnya mempunyai potensi besar bagi budidaya air (*aquaculture*) seperti pertambakan udang. Pantai selatan bukan hanya



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

berada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetapi juga berada di propinsi lain yang dapat menjadi harapan bidang perikanan. Oleh karena itu mulai tahun 2001 *pilot project* tambak udang diperluas ke dua kabupaten di Jawa Tengah yang berdekatan dengan DIY yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Sebagaimana halnya dengan DIY pengembangan tambak udang di Jateng mendapat dukungan penuh pemerintah daerah dan Gubernur Jateng (Pokja Pemberdayaan UKM-K, 2003).

Rakyat pantai selatan menghadapi kendala ketidakmampuan mengembangkan potensi pantai yang belum tergali, selain itu mereka sulit untuk bertani karena lahan yang ditempati kurang cocok untuk budidaya pertanian. Tanah yang dimiliki penduduk berukuran kecil berkisar 0,25 hektar per keluarga, bahkan ada juga yang praktis tidak memiliki lahan sama sekali, namun sebetulnya masyarakat pesisir mempunyai potensi lahan yang cukup besar sebagai sumberdaya manusia yang baik. Sumberdaya manusia (SDM) pesisir yang selama ini tertinggal dalam pendidikan dapat diberdayakan apabila diberi pembelajaran dalam bidang yang tepat, selain itu nelayan golongan ekonomi retan sangat tangguh menghadapi laut dan keadaan sulit. Sebagai orang yang biasa hidup di perairan, mereka akan mudah menyesuaikan diri dengan usaha tambak udang (Pokja Pemberdayaan UKM-K, 2003).

Potensi lahan untuk pertambakan udang di pesisir selatan terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Barat. Potensi tersebut dapat diberdayakan dengan dukungan



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dan komitmen propinsi serta pemda dalam mendukung Kepres Nomor 124 Tahun 2001 JO. Nomor 8 Tahun 2002 JO Nomor 34 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Deklarasi Jogja 27 Maret 2003 tentang Pemberdayaan UKM-K dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Luas lahan potensial untuk kawasan pertambakan di pesisir selatan Jawa dapat diketahui dari Tabel 1.

Tabel 1. Daerah Potensial untuk Pengembangan Tambak Udang di Pesisir Selatan Jawa

NO	Propinsi	Kabupaten	Luas (Ha)	Total Luas (ha)
1	Jawa Timur	1. Pacitan	475	4675
		2. Popoh	325	
		3. Sene	575	
		4. Serang	600	
		5. Pengeluran	575	
		6. Meleman	1025	
		7. Pelindu	1100	
2	Jawa Tengah	1. Purworejo	200	400
		2. Kebumen	200	
3	DIY	1. Gunung Kidul	100	800
		2. Bantul	200	
		3. Kulon Progo	500	
4	Jawa Barat	1. Ciemas	975	5225
		2. Genteng	500	
		3. Muara Gede	525	
		4. Tegal Buleud	625	
		5. Cidaun	525	
		6. Cibarebeg	800	
		7. Cipatujah	425	
		8. Klapa Genep	575	
		9. Pangandaran	275	

Sumber: Pokja Pemberdayaan UKM-K, 2003

Di Propinsi Jawa Tengah terdapat 2 (dua) kabupaten yang berpotensi untuk pengembangan tambak udang windu yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Luas wilayah masing-masing kabupaten yang dapat dikembangkan menjadi tambak udang diperkirakan 200 hektar (Pokja Pemberdayaan UKM-K, 2003).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

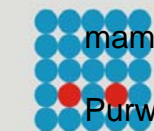


Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Data Bapeda Kabupaten Purworejo (2003) menunjukkan, potensi untuk tambak seluas 525 hektar, dengan perincian potensi tambak ekstensif hingga intensif yang berupa lahan aluvial seluas 210 hektar dan potensi untuk tambak intensif yang berupa lahan pasir seluas 315 hektar. Tambak ekstensif dan semi intensif diprediksi menghasilkan udang 1 hingga 2 ton per hektar per tahun, sedangkan tambak intensif diprediksikan berproduksi 6 hingga 8 ton per hektar per tahun dengan 2 kali musim tanam. Upaya pemanfaatan budidaya tambak yang telah dilakukan oleh masyarakat seluas 44 hektar dan swasta seluas 6 hektar. Rencana ke depan Kabupaten Purworejo berupaya mengadakan ekstensifikasi tambak air payau yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kawasan pantai.

Kabupaten Purworejo memiliki panjang pantai 21 kilometer tempat bermuara Sungai Bogowonto, Sungai Cokroyasan, dan Sungai Wawar. Kawasan ini mulai berkembang sejak dibangun jalan baru yang dikenal dengan jalan selatan-selatan atau jalan *Daendels* yang semula berupa jalan tanah. Kawasan pantai diarahkan menjadi Kawasan Bahari Terpadu (KBT), berupa kawasan wisata yang bertumpu pada kegiatan perikanan, kelautan, pertanian dan peternakan serta hunian. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya tambak akan menjadi embrio kegiatan yang mampu menjadi mesin pertumbuhan (*growth engine*) bagi KBT (Bapeda Purworejo, 2003).

Usaha Pemda Purworejo untuk memberdayakan masyarakat pesisir dituangkan dalam visi pengembangan kawasan pesisir yaitu



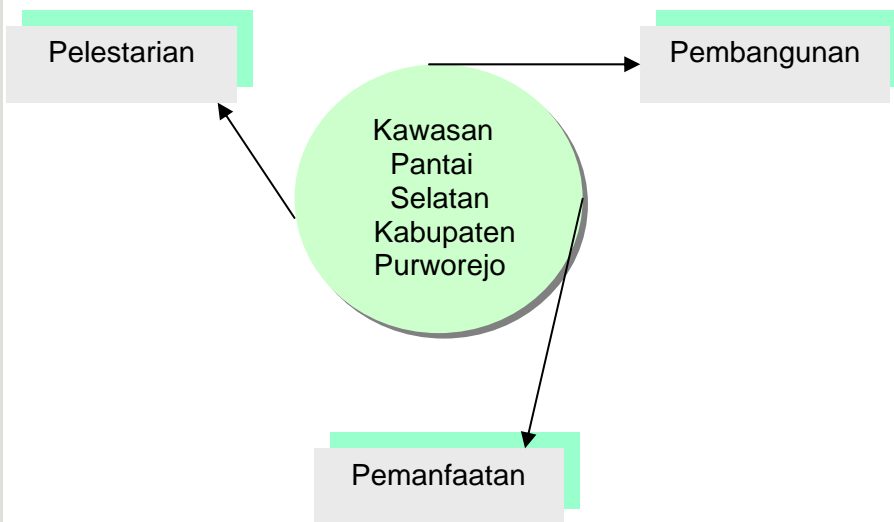
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

“terwujudnya masyarakat pesisir yang sejahtera dalam kawasan bahari yang terpadu dan berwawasan lingkungan”. Misi yang ingin dicapai adalah (1) adanya keterpaduan penanganan kawasan antara aspek ekologis, teknologi, infrastruktur, dan ekonomi yang berorientasi pasar; (2) penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan di laut; (3) penyediaan prasarana dasar kawasan (jalan, saluran, air bersih, listrik) secara lintas sektoral dan (4) membentuk nilai tambah kawasan sebagai tempat pendidikan kelautan dan tempat wisata bahari (Bapeda Purworejo, 2003).

Strategi Dasar pengembangan kawasan pesisir yang diterapkan Kabupaten Purworejo adalah memadukan pelestarian, pembangunan dan pemanfaatan. Kegiatan ekonomi kawasan yang memadukan ketiga aspek tersebut terangkum dalam bagan proses sinergi (Gambar 2).

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang, tahun 2010

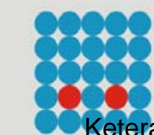


Keterangan : Sinergi antara pelestarian, pemanfaatan, dan pembangunan kawasan pesisir
 Sumber : Bapeda Purworejo

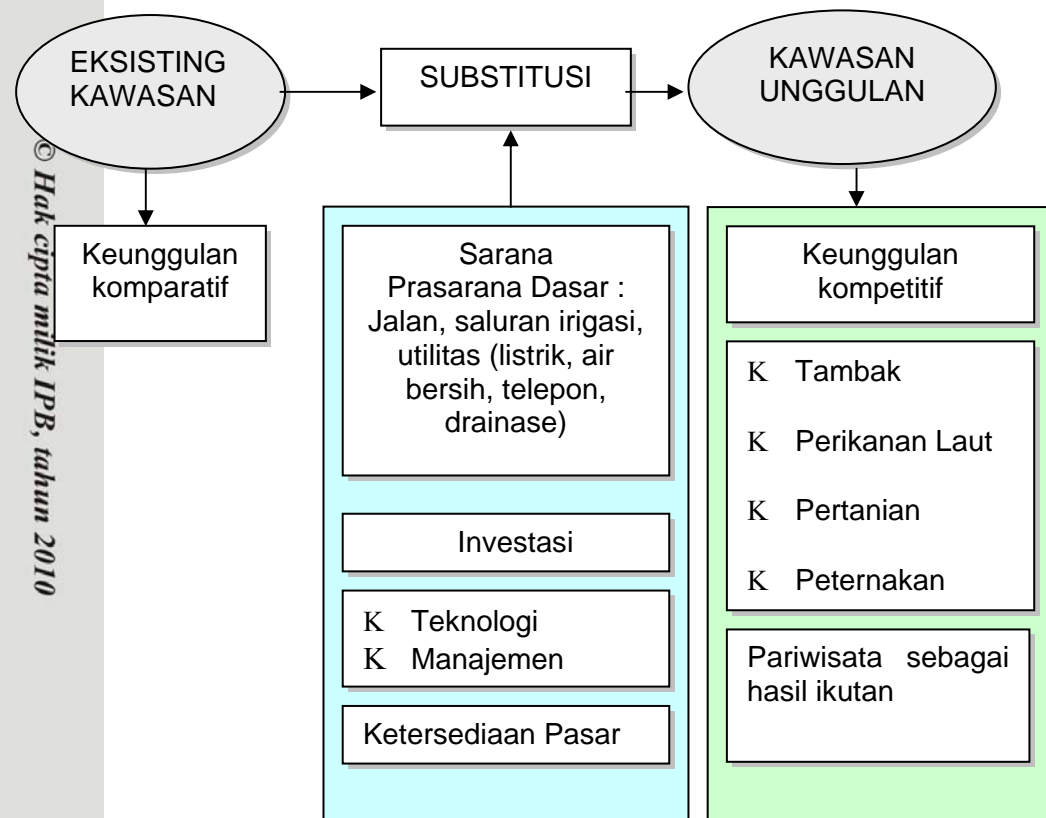
Gambar 2. Proses Sinergi Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Purworejo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Kawasan pantai merupakan bentang alam yang didominasi oleh pantai dan areal persawahan, sehingga pembangunan kawasan ditekankan pada aspek pelestarian alam. Aspek pelestarian bersinergi dengan aspek pemanfaatan sumberdaya alam dan wisata. Konsep yang digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pantai sebagai penggerak pembangunan wilayah dapat diketahui dari Gambar 3.



Keterangan : Pengembangan kawasan pesisir menjadi kawasan unggulan
 Sumber : Bapeda Purworejo

Gambar 3. Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Purworejo

Rencana pengembangan kawasan pesisir didorong oleh potensi dan posisi strategis kawasan dengan tujuan meningkatkan produksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





Hak cipta dilindungi Undang-Undang

masyarakat bidang pertambakan, perikanan laut, pertanian, dan peternakan. Kegiatan budidaya sektor kelautan dan perikanan tambak merupakan kegiatan inti yang mampu memacu pertumbuhan kawasan, sedangkan kegiatan wisata hanya sebagai hasil ikutan. Kegiatan inti diharapkan akan menarik masyarakat pada kegiatan budidaya perikanan maupun investor untuk menanamkan modal. Hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli daerah (Bapeda Purworejo, 2003).

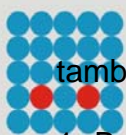
Peran serta pemerintah daerah untuk menarik investor dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendukung yaitu terminal angkutan, pusat perdagangan, pos polisi, penerangan jalan, dan perbaikan jalan. Dukungan untuk pengembangan tambak berupa pembangunan muara sungai dan normalisasi sungai sebagai sumber irigasi tambak. Pemda juga memberikan bantuan teknis dan manajemen terhadap pengembangan pertanian, pemugaran lingkungan perumahan, pembangunan stasiun kolaborasi, pengembangan riset teknologi, penyusunan *master plan*, dan pembangunan utilitas lain seperti jaringan telekomunikasi, listrik, air bersih, dan saluran drainase. Adanya dukungan pemerintah diharapkan dapat menarik peran investor dalam pembangunan pelabuhan ikan, wisata bahari, industri, *colt storage*, pembangunan tambak, serta peningkatan transportasi dan perhubungan (Bapeda Purworejo, 2003).

Melihat adanya peluang pengembangan tambak udang windu di kawasan pesisir selatan Jawa. Kantor Perikanan dan Kelautan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor
MB-IPB



menangani masalah perikanan di Kabupaten Purworejo bermaksud mengadakan pengembangan tambak udang windu seluas 10 hektar per tahun di kawasan tersebut. Dalam proses pengembangan tambak udang dipandang perlu mengadakan kajian mengenai kelayakan proyek yang akan membantu pemda untuk menarik investor menanamkan modalnya.

1.2. Rumusan Masalah

Secara ringkas identifikasi masalah yang ditemui dalam upaya pengembangan tambak udang di kawasan pesisir adalah:

1. Potensi tambak udang di kawasan pesisir seluas 525 hektar belum dikembangkan untuk usaha budidaya.
2. Masyarakat kawasan pesisir umumnya masih mengandalkan pada perikanan tangkap dan belum banyak mengarah ke usaha budidaya, padahal sebagian besar nelayan tidak selalu dapat setiap saat bekerja melaut dan mencari ikan, terutama pada musim angin barat.
3. Pembangunan tambak udang windu memerlukan investasi yang besar sehingga perlu kerjasama antara masyarakat, pemda, dan investor. Masyarakat selaku pemilik lahan, pemda selaku fasilitator dan menyiapkan regulasi, sedangkan investor berkemampuan menginvestasikan dananya.

Masalah yang dikaji dalam penelitian analisis kelayakan proyek tambak udang windu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kelayakan proyek tambak udang windu secara teknis, ketersediaan pasar, kelembagaan, dan lingkungan?



Hak cipta dilindungi Undang-Undang



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

2. Bagaimana kelayakan finansial proyek tambak udang windu di kawasan pesisir?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui kelayakan proyek tambak udang windu. Tujuan penelitian secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kelayakan proyek tambak udang windu secara teknis, ketersediaan pasar, kelembagaan, dan lingkungan.
2. Menganalisis kelayakan finansial proyek tambak udang windu di kawasan pesisir.

Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan pengembangan proyek tambak udang windu di kawasan pesisir.

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

UNTUK SELENGKAPNYA TERSEDIA DI PERPUSTAKAAN MB IPB

© Hak cipta milik IPB, tahun 2010



Hak cipta dilindungi Undang-Undang



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.